

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar

Ayu Astuti.S<sup>1</sup>, Veronika Sari Den Ka<sup>2</sup>, Sri Nirmala Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Bosowa

<sup>1</sup>[ayuastuti2311@email.com](mailto:ayuastuti2311@email.com), <sup>2</sup>[vdenka@gmail.com](mailto:vdenka@gmail.com), <sup>3</sup>[sri.nirmala.plp@gmail.com](mailto:sri.nirmala.plp@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 10-07-22

Disetujui 10-07-22

Diterbitkan 25-08-22

### Kata kunci:

Penerimaan Pajak Daerah;  
Jumlah Penduduk; Inflasi;  
Produk Domestik Regional  
Bruto

### Keywords :

Regional Tax Revenue;  
Total Population; Inflation;  
Gross Regional Domestic  
Product

### ABSTRAK

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar. Penduduk Kota Makassar tetap bertumbuh tetapi tidak menyebabkan inflasi yang tinggi sehingga tidak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah. Penduduk Kota Makassar terindikasi produktif sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah

### ABSTRACT

*Regional Tax is a mandatory levy paid by the population of a certain area to the regional government that will be used for the benefit of the regional government and the public interest. To optimize local tax revenue, several related variables of population, inflation and Gross Regional Domestic Product. This study aims to determine the effect of population on local tax revenues, the influence of inflation on local tax revenues and the effect of Gross Regional Domestic Product on local tax revenue in the City of Makassar. Data analysis techniques used are multiple linear regression. The results of the study show that the population and inflation do not affect the local tax revenue and the Gross Regional Domestic Product affects the local tax revenue in Makassar City. Makassar City's population continues to grow but does not cause high inflation so it does not affect the level of local tax revenue. Makassar City's residents are indicated to be productive so as to increase local tax revenue.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah.

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia R. , Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, 2004).

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi empat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi tiga yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Indonesia R. , Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999).

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Adapun hal ini sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang dibagi menjadi lima yang terdiri dari Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi menjadi sebelas yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.
- d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, inflasi dan PDRB secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Tegal. Penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh positif wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah (Haniz & Sasana, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) dengan judul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah, dan pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah kota surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap pajak daerah, variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah (Arianto & Padmono, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Artha, dkk (2016) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil. Hasil dari penelitian yaitu variabel jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Artha, Badjuri, & Zainuri, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) dengan judul pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong, Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong (Asmuruf, Rumat, & Kawung, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, variabel PDRB harga konstan dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Prasetyo, 2016).

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

### *Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah*

Jumlah penduduk merupakan pasar yang potensial bagi hasil produksi dan jasa, menguji jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Arianto (2014) jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Asmuruf, dkk (2015) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Helti (2013) Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah, semakin besar laju pertumbuhan jumlah penduduk akan ada kemungkinan untuk menambah jumlah penerimaan pajak daerah. sehingga jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

### *Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah*

Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan jika dihitung menggunakan t-hitung terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut didapatkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Arianto (2014) Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan jika dihitung menggunakan t-hitung terhadap penerimaan pajak daerah. sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak daerah. Menurut Haniz dan Sasana (2013) Inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah. Menurut Artha, dkk (2015) Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

### *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah*

Dengan meningkatnya PDRB akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bisa membayar pajak dengan tertib juga memungkinkan daerah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Arianto (2014) PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Artha, dkk (2015) PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Helti (2013) PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

### *Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah*

Menurut Aryanti, dkk (2013) jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Susanto (2013) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Shiska, dkk (2013) jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Pengaruh Jumlah penduduk, inflasi dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan agustus 2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif berupa hasil dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2010). Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data (Sugiyono 2015:137) (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2015). Sumber data dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel independen sebagai berikut:

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Data diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan Jiwa di Kota Makassar.

Inflasi adalah kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya di Kota Makassar. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Data di dapat dari kantor Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan Rupiah di Kota Makassar.

Proses pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel, penulis menetapkan jumlah sampel (n) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan realisasi penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 5 tahun terakhir (2012-2016) yaitu sebanyak 60 sampel (5 tahun x 12 bulan).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu jumlah penduduk (X1), inflasi (X2), PDRB (X3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y). Di dalam penggunaan analisis regresi linear berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,128 dengan signifikansi 0,898. Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai signifikan lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk akan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,128, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Prasetyo (2016) yang menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil pemungutan pajak tidak hanya digunakan untuk memasukkan ke dalam kas negara saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Kebijakan fiskal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah untuk menstabilisasikan atau mendorong tingkat aktivitas ekonomi.

Hipotesis tersebut juga di dukung oleh penambahan jumlah penduduk, dimana jumlah penduduk mengalami peningkatan namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

### **Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -0,937 dengan signifikansi 0,353. Inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai signifikan lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada inflasi akan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,937, hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Artha, dkk (2015) yang menunjukkan inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa apabila inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga digunakan untuk peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimana terjadi peningkatan inflasi namun tidak mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak daerah.

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,667 dengan signifikansi 0,001. PDRB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada inflasi akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 3,667, hal ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pengaruh positif yang mengindikasikan bahwa apabila PDRB mengalami kenaikan maka angka penerimaan pajak daerah juga mengalami kenaikan.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Helti (2013) PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa PDRB merupakan nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dimana PDRB mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga PDRB mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil uji secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 39,198 dengan signifikansi 0,000. Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk, inflasi dan PDRB akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan regresi sebesar 39,198, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, inflasi dan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pengaruh positif mengindikasikan bahwa apabila jumlah penduduk, inflasi dan PDRB mengalami kenaikan secara simultan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Shiska, dkk (2013) jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

### **KESIMPULAN**

Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah memiliki kontribusi terhadap penerimaan dalam mengatasi masalah pembiayaan pengelolaan dan pembangunan daerah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti jumlah penduduk mengalami peningkatan namun tidak mempengaruhi

penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu prasetyo (2016) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hal ini Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti ketika harga barang naik atau turun, tidak mengurangi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Artha, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dengan ditunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti PDRB mengalami kenaikan maka angka penerimaan pajak daerah juga mengalami kenaikan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya menurut Helti (2013) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil Penelitian di atas dan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran-saran yang dikemukakan adalah pemerintah Kota Makassar sangat diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah atau pembangunan perekonomian di Kota Makassar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah atau menambah penghasilan daerah.

PDRB sebagai salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah seharusnya dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Dengan meningkatnya PDRB maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi daerah sehingga masyarakat akan lebih tertib untuk membayar pajak.

Secara umum, hasil uraian di bab-bab sebelumnya masih kurang, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel yang berpotensi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sehingga dapat diupayakan penerimaan pajak daerah yang terus naik dengan menggunakan metode dan analisa data yang lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong.
- Awliarahman, N. (2016). *Pengaruh SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*.
- Badan Pusat Statistik. (t.thn.). Dipetik Febuari 28, 2018, dari Badan Pusat Statistik: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- bitar. (2016, 06 22). *6 Pengertian Asuransi Menurut Para Ahli Terlengkap*. Dipetik 02 24, 2018, dari [www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap/](http://www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap/)
- Dama, H. Y., Lopian, A. L., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *16*.
- Dudung. (2015, 12 11). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Lengkap Dengan Unsur serta Jenisnya*. Dipetik 03 07, 2018, dari <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-unsur-serta-jenisnya/>
- Giani, G. M. (2016). *Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN*, 3.
- Haniz, N. F., & Sasana, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal.
- Indonesia, P. R. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). Metodologi Penelitian. Dalam *Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Adiatama.
- Kresna, Y. (2014). *Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*.
- Lestari, D. (2016). *Pengaruh SPT Masa PPN dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN*.
- Lubis, F. K. (2016). *Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN*, 5 No 2.

- Luqman. (2016, April 4). *Teori dan Asas Pemungutan Pajak*. Dipetik Maret 6, 2018, dari <http://www.kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak/>
- Makassar, B. P. (2014). *Kota Makassar Dalam Angka Makassar Municipality in figures 2014*. Kota Makassar: Katalogic.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Dalam *Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Nurrokhman, A. (2014). *Analisis Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN. Online Pajak*. (t.thn.). Dipetik Maret 29, 2018, dari [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)
- Pandiangan, D. S. (2014). *Pengaruh SKPKB, Jumlah PKP, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPN*.
- Prasetyo, S. I. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011-2014).
- Putong, I. (2010). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. (2013). PMK NO.197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). PMK NO 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP. Indonesia.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Dalam *Edisi 8 Buku 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli DAerah (PAD).
- Susyanti, J., & Dahlan , A. (2015). PERPAJAKAN. Dalam *Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.